

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kawasan Arktik dikenal sebagai suatu kawasan dengan lautan dan daratan yang dipenuhi dengan es. Arktik menurut National Snow and Ice Data Center (2020) kerap kali didefinisikan sebagai kawasan di atas Lingkaran Arktik atau *Arctic Circle*. Kawasan Arktik ini meliputi Amerika Serikat (Alaska), Kanada, Rusia, Norwegia, Denmark (Greenland), Finlandia, Swedia, dan Islandia, yang mana negara-negara tersebut juga merupakan negara anggota Dewan Arktik (Congressional Research Service, 2020: 4), serta wilayah Kutub Utara. Perlu diketahui bahwa beberapa dekade yang lalu, kawasan Arktik hanya dapat dilalui oleh kapal *icebreakers* yang memiliki kemampuan maupun perlengkapan dalam memecah es (Groc, 2017). Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi di kawasan Arktik ini mengalami perubahan yang dikenal dengan peristiwa *changing Arctic* atau perubahan kawasan Arktik yang disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Peristiwa *changing Arctic* ini ditandai dengan lapisan es di kawasan Arktik yang mencair karena permukaan air laut lebih mudah dalam menyerap panas matahari, sehingga peningkatan suhu udara di kawasan Arktik lebih cepat (National Snow and Ice Data Center, 2020).

Lebih lanjut, peristiwa *changing Arctic* yang ditandai dengan kawasan Arktik yang menjadi lebih 'hijau' dan hangat, menyebabkan peluang untuk mengakses kawasan Arktik, seperti untuk penelitian, eksplorasi, aktivitas pembangunan ekonomi lainnya, serta munculnya jalur pelayaran menjadi lebih besar (NOAA, 2017:1). Jalur pelayaran ini dikenal dengan *Northern Sea Route* atau Rute Laut Utara. Rute Laut Utara memiliki peran yang sangat penting bagi pelayaran dan jalur perdagangan laut, khususnya dari Asia ke Eropa, karena mampu memangkas waktu, biaya, dan jarak menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, pada bulan Agustus dan September 2009, dua kapal angkat berat Jerman, yaitu MV Beluga Foresight dan MV Beluga Fraternity, membawa muatan pipa baja dari Arkhangelsk, Rusia ke Nigeria menggunakan Rute Laut Utara (Guschin, 2013).

Jalur ini telah mempersingkat jarak sejauh 3000 mil laut dan mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 200 ton per kapal, sehingga menghasilkan penghematan sebesar \$600.000.

Setahun kemudian, kapal Hong Kong, yakni MV Nordic Barents, mengirim bijih besi dari Kirkenes, Norwegia ke Shanghai menggunakan rute yang sama dan memotong biaya hingga \$180.000. Tidak hanya itu, para ahli di perusahaan transportasi Norwegia, Tschudi Shipping Company, juga memperkirakan bahwa rute dari Kirkenes atau Murmansk ke Shanghai melalui Rute Laut Utara akan memangkas total waktu berlayar selama 16 hari (Guschin, 2013). Rute Laut Utara yang terbukti lebih efektif dan efisien kemudian menyebabkan banyak kapal dengan berbagai kepentingan lebih memilih untuk mengambil Rute Laut Utara yang dapat dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah kapal yang menggunakan Rute Laut Utara. Pada tahun 2010, hanya ada empat kapal yang menggunakan rute ini. Akan tetapi pada tahun 2012, terjadi peningkatan jumlah kapal, yakni sejumlah 46 kapal dengan 1,2 juta ton kargo yang melalui Rute Laut Utara (Guschin, 2013).

Selain terciptanya jalur pelayaran yang baru, Groc (2017) menambahkan bahwa perubahan pada kawasan Arktik seakan-akan ‘membuka pintu’ tidak hanya terhadap kapal pesiar, namun juga pada peluang eksplorasi sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas, dan mineral. Dampak dari peristiwa *changing Arctic* ini juga dirasakan oleh masyarakat Shishmaref, yakni sebuah desa di Alaska dengan jumlah penduduk sebanyak 600 orang, yang mana mereka harus merelokasi seluruh desa karena adanya erosi di pinggir pantai yang menyebabkan banyak rumah jatuh ke laut (Groc, 2017). Selain itu, pola cuaca menjadi semakin sulit untuk diprediksi, sehingga mereka kesulitan untuk berburu ikan di laut. NOAA (2017: 2) kemudian menggarisbawahi bahwa peristiwa *changing Arctic* ini tidak hanya berpengaruh pada orang-orang yang hidup di Alaska, namun juga berpengaruh pada masyarakat yang bahkan jauh dari kawasan Arktik.

Berangkat dari berbagai peristiwa yang terjadi di kawasan Arktik, negara-negara Arktik kemudian membentuk sebuah forum internasional, yakni Dewan Arktik. Dewan Arktik merupakan forum internasional di kawasan Arktik yang

berperan dalam mendorong kerja sama, koordinasi, serta interaksi antarnegara di kawasan Arktik terhadap isu-isu di kawasan Arktik, khususnya isu yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan dan upaya perlindungan lingkungan dalam kawasan Arktik (Arctic Council, 2018). Pada Deklarasi Ottawa¹ disebutkan mengenai beberapa negara yang merupakan anggota dari Dewan Arktik, yaitu Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini tak lain merupakan negara-negara yang berada dalam wilayah *Arctic Circle* atau Lingkaran Arktik.

Peristiwa *changing Arctic* rupanya juga menarik perhatian dari negara di luar wilayah Arktik, yaitu Singapura. Ketertarikan Singapura di kawasan Arktik menjadi fenomena negara yang menarik untuk dibahas karena letak negara ini berjarak jauh dengan kawasan Arktik, yakni sekitar 7.000 km (Lay, 2018) dan 11.000 km dari Greenland (Tan, 2016). Singapura merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan luas wilayah yang kecil dan memiliki penduduk sebanyak 5 juta jiwa. Meski dipandang sebagai negara kecil, namun Singapura mampu menjadi *international trade hub* atau pusat perdagangan internasional. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Singapura yang strategis, yakni berada di Selat Malaka yang selama ini merupakan jalur pelayaran utama untuk perdagangan di Asia dan sekitarnya sejak abad ke-7 (Bennett, 2016).

Sejumlah sumber telah mengidentifikasi mengenai beberapa kepentingan Singapura di kawasan Arktik. Zhuravel dan Danilov (2016: 127) menyatakan bahwa adanya aktivitas diplomasi serta kepentingan ekonomi Singapura terhadap Arktik menunjukkan adanya ambisi kepentingan Singapura terhadap Arktik. Watters dan Tonami (2012: 106) berpendapat bahwa kepentingan Singapura di kawasan Arktik sangat terkait dengan posisi Singapura sebagai pemangku kepentingan maritim, yang mana jika jalur pelayaran melalui kawasan Arktik semakin terbuka, maka dapat mengancam perekonomian Singapura yang selama ini diperoleh dari posisinya yang berada di jalur pelayaran internasional di Selat Malaka. Kemudian, argumen serupa juga dikemukakan oleh Menon (2019: 1-3) dan

¹ Dalam Arctic Portal Library (t.t.) dijelaskan bahwa Deklarasi Ottawa adalah deklarasi pembentukan Dewan Arktik yang dilaksanakan di Ottawa, Kanada pada tahun 1996.

Schulze (2017:5) yang menyatakan bahwa selain berkepentingan tinggi terhadap pengembangan teknologi dan inovasi, hukum internasional, serta perdagangan, Singapura juga sangat bergantung pada perdagangan global, sehingga adanya perubahan iklim di kawasan Arktik sangat memengaruhi perdagangan global Singapura (Schulze, 2017:11). Berangkat dari kepentingan Singapura di kawasan Arktik, penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi Singapura sebagai negara yang kecil dan berjarak jauh dengan kawasan Arktik dalam mewujudkan kepentingannya di kawasan Arktik.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagai negara yang kecil dan jauh dari kawasan Arktik, bagaimana strategi Singapura dalam meraih kepentingan-kepentingannya di kawasan Arktik?

1.3. Tinjauan Pustaka

Sejumlah penulis telah mengidentifikasi adanya kepentingan Singapura di kawasan Arktik. Viji Menon (2019: 1-3) dalam karya berjudul “Climate Change and Global Warming: Singapore and the Arctic”, memaparkan mengenai tantangan-tantangan dari adanya perubahan iklim di Arktik bagi Singapura, seperti meningkatnya permukaan air laut, serta rute perdagangan Singapura yang berpotensi untuk terancam. Selain itu, Menon (2019: 3) juga menjelaskan mengenai adanya peluang di balik adanya perubahan iklim di kawasan Arktik, yakni mulai terbukanya gas dan minyak, pengembangan *research and development*, serta adanya peluang berkembangnya perusahaan *shipbuilding*. Senada dengan ini, Watters dan Tonami (2012: 104-113) dalam tulisan berjudul “Singapore: An Emerging Arctic Actor” menyatakan bahwa terdapat beberapa kepentingan Singapura di kawasan Arktik, yakni kepentingan Singapura sebagai pemangku kepentingan maritimnya, serta ancaman dan peluang Arktik terhadap perekonomian Singapura. Dalam hal ini, peran sektor maritim sangat penting bagi Singapura. Selain itu, Watters dan Tonami (2012: 107-108) memandang pula adanya ancaman maupun peluang di Arktik bagi Singapura sebagian besar mengarah pada sektor maritim Singapura, sehingga kepentingan nasionalnya pun berdasar pada sektor

maritimnya.

Karya lain ditulis oleh Schulze (2017: 4-5) yang berjudul “Arctic Strategies Round-up” membahas mengenai kepentingan beberapa negara yang tergabung dalam Dewan Arktik baik sebagai anggota maupun sebagai pengamat, seperti Kanada, Denmark, Greenland, Faroe Islands, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat sebagai anggota, serta Jerman, Perancis, Swis, Spanyol, Polandia, Inggris, Belanda, Italia, India, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura sebagai pengamat. Pada kepentingan Singapura sendiri, Schulze (2017:5) menyatakan bahwa Singapura berkepentingan tinggi terhadap pengembangan teknologi dan inovasi, hukum internasional, serta perdagangan. Schulze (2017:11) juga menyatakan bahwa Singapura sangat bergantung terhadap perdagangan global, sehingga adanya perubahan iklim di kawasan Arktik sangat memengaruhi perdagangan global Singapura.

Sementara itu, Solli, Rowe, dan Lindgren (2013: 253-270) dalam karyanya yang berjudul “Coming into the cold: Asia’s Arctic interests” membahas mengenai negara-negara Asia yang juga menaruh kepentingan terhadap kawasan Arktik, yakni Tiongkok, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Solli, Rowe dan Lindgren (2013: 257-258) mengemukakan bahwa Tiongkok memandang Arktik sebagai peluang ekonomi yang bagus karena dengan adanya perubahan iklim di Arktik, pengiriman barang melalui laut menjadi semakin mudah dan lebih efisien. Sedangkan pada Jepang yang merupakan negara maritim, menaruh kepentingan pada sektor ekonomi dan rute pengiriman barang melalui laut menjadi kekhawatiran bagi Jepang karena dirasa mampu merugikan perekonomian Jepang. Sementara, Korea Selatan berfokus pada aspek lingkungan dan ekonomi, dibandingkan dengan sektor keamanan maupun politik. Permasalahan lingkungan di kawasan Arktik membuat Korea Selatan merasa khawatir, mengingat Korea Selatan juga menjadi bagian dari masyarakat global (Solli, Rowe, Lindgren, 2013: 259). Kemudian pada Singapura, adanya peluang semakin mudahnya *Northern Sea Routes* (NSR) mengancam keberadaan Singapura sebagai *transit hub* bagi pengiriman barang menggunakan laut ke Selat Malaka. Permasalahan keamanan juga berkaitan dengan lingkungan, yang mana perubahan iklim Arktik serta

perubahan pada permukaan air laut dirasa mampu mengancam keberadaan Singapura yang merupakan negara dengan dataran rendah (Solli, Rowe, dan Lindgren, 2013: 259).

Terakhir, karya lain yang secara spesifik menyinggung Singapura yang memposisikan diri sebagai *leading maritime nation* dikemukakan oleh Zhuravel dan Danilov (2016:127) dengan berjudul “Singapore on the way to the Arctic”. Dalam tulisan tersebut, Zhuravel dan Danilov (2016:128) merasa bahwa Singapura merupakan aktor berpengaruh di samudera dan memposisikan diri sebagai *leading maritime nations*. Zhuravel dan Danilov (2016: 128) berpendapat bahwa peran Arktik bagi Singapura merupakan sebuah peluang yang baik untuk menjadikan Singapura meraih statusnya sebagai kekuatan maritim global. Selain dalam sektor maritim, Singapura juga tertarik pada sektor energi. Tulisan-tulisan ini secara eksplisit menunjukkan adanya kekhawatiran Singapura terhadap perubahan iklim yang terjadi di kawasan Arktik, khususnya dalam permasalahan pengiriman barang melalui jalur laut. Namun demikian, belum terlihat dalam tulisan-tulisan ini mengenai strategi apa yang diambil Singapura untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di kawasan Arktik. Skripsi ini menawarkan bahasan mengenai strategi Singapura dalam meraih kepentingan-kepentingannya di kawasan Arktik.

1.4. Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis mengenai bagaimana strategi yang dilakukan oleh Singapura dalam meraih kepentingannya di kawasan Arktik, dapat dilihat dari kerangka pemikiran berikut. Pertama, yakni terkait dengan strategi dalam meraih kepentingan nasional suatu negara. Dalam hal ini, bentuk dari strategi sangat beragam, salah satunya yakni dapat dilakukan dengan menggunakan institusi internasional sebagai wadah kerja sama antarnegara. Kerja sama negara dalam sebuah institusi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan liberal institusionalisme, yang mana pendekatan ini menganggap bahwa institusi internasional memiliki peran utama dalam memfasilitasi kerja sama. Tidak hanya itu, selain menjalin kerja sama dengan menggunakan institusi internasional, yakni

Dewan Arktik, strategi lain yang digunakan oleh Singapura adalah dengan melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara Arktik.

1.4.1. Strategi Negara dalam Meraih Kepentingan Nasional

Negara membutuhkan strategi untuk meraih kepentingan nasionalnya. Kata 'strategi' berasal dari Yunani Kuno, yakni *strategia* yang berarti seni seorang jenderal. Strategi juga pada awalnya identik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan militer atau perang. Akan tetapi, penggunaan kata 'strategi' kini menjadi hal yang umum dalam kehidupan sehari-hari, yang mana strategi dapat digunakan dalam hal bisnis, manajemen, ekonomi, maritim, dan lain-lain. Dalam mendefinisikan kata strategi, tidak ada definisi pasti mengenai makna strategi. Menurut Collins Dictionary (t.t.), strategi adalah rencana umum atau serangkaian rencana yang bertujuan untuk mencapai sesuatu, terutama dalam jangka panjang. Liddle Hart dalam Nickols (2016: 2) berpendapat bahwa strategi merupakan seni mendistribusi dan menerapkan cara militer untuk memenuhi tujuan kebijakan.

Lebih lanjut, Joint Chief of Staff (2018: 1) menyatakan bahwa strategi adalah tentang bagaimana negara menggunakan kekuatan yang tersedia bagi mereka untuk melakukan kontrol terhadap seseorang, tempat, benda, dan peristiwa untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan nasional mereka. Dalam meraih kepentingan nasional, negara tentu harus memiliki strategi yang baik. Hal ini disebabkan strategi yang baik merupakan strategi yang mampu membawa negara dalam meraih tujuan yang dikehendakinya. Maka dari itu, strategi harus direncanakan dengan matang agar kepentingan nasional dapat tercapai. Strategi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari yang bersifat koersif atau paksaan hingga kerja sama.

1.4.2. Kebijakan sebagai Implementasi Strategi

Strategi tidak hanya sekedar dirumuskan saja, namun juga perlu diimplementasikan. Dalam hal ini, kebijakan menjadi salah satu bentuk implementasi dari strategi. Kebijakan adalah hukum, regulasi, prosedur, tindakan administratif, praktik insentif maupun sukarela dari pemerintah atau institusi lain.

Keputusan kebijakan biasanya terefleksi pada alokasi sumber daya (Centers for Disease Control and Prevention, t.t.). Sedangkan, kebijakan menurut Budiharjo (1992) adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam upaya memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2004) adalah alat untuk mencapai tujuan, yang mana kebijakan ini merupakan program yang diproyeksikan dan berkaitan dengan tujuan, nilai, dan praktek.

Dalam kaitannya dengan strategi, strategi harus digunakan dalam merumuskan kebijakan apapun yang digunakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi menjadi perumusan dan arahan mengenai bagaimana negara akan bertindak. Sedangkan, kebijakan merupakan sebuah keputusan mengenai bagaimana negara bertindak guna meraih kepentingan atau tujuan nasionalnya. Maka dari itu, setelah negara merumuskan strateginya, strategi tersebut perlu untuk diimplementasikan, yakni dengan membuat keputusan yang menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya negara dalam meraih kepentingan yang diinginkan.

1.4.3. Liberal Institutionalisme

Kerja sama antarnegara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yakni dengan menggunakan institusi internasional. Kerja sama antarnegara dengan melalui institusi dapat dijelaskan lebih lanjut melalui pendekatan liberal institutionalisme. Liberal institutionalisme menganggap bahwa institusi domestik maupun internasional memainkan peran utama dalam memfasilitasi kerja sama dan perdamaian antarnegara-bangsa (Johnson dan Heiss, 2018: 1). Keohane (2012: 125) berpendapat bahwa institusi dan aturan dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara yang saling menguntungkan. Kemudian, Wigell (2015: 145) juga berpendapat bahwa liberal institutionalis menerima adanya kebutuhan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain dalam meraih kepentingan nasional.

Liberal institutionalisme menolak pandangan realis mengenai politik internasional yang selalu berkaitan dengan *struggle for power* dan isu-isu mengenai

keamanan militer selalu menjadi prioritas utama (Devitt, 2011: 1). Permasalahan yang terjadi di dunia tidak hanya terjadi dalam sektor militer, namun juga pada sektor maritim, ekonomi, sosial, energi, dan lain-lain. Liberal institusionalisme juga beranggapan bahwa negara mencari untuk memaksimalkan *absolute gains*-nya dengan melalui kerja sama dan negara tidak terlalu mengkhawatirkan tentang keuntungan yang didapat oleh negara lain (Devitt, 2011: 2). Dalam hal ini, pendekatan liberal institusionalis memandang bahwa adanya institusi mampu memberikan hasil pada negara-negara yang terlibat, meskipun hasil yang didapat tiap negara tidak sama.

1.4.4. Institusi Internasional sebagai Wadah Kerja Sama Antarneegara

Berdasarkan pendekatan liberal institusionalisme, negara dapat menggunakan institusi sebagai wadah untuk bekerja sama. Definisi mengenai institusi sangat beragam. Douglass North (1987: 6) dalam Keohane (1988: 384) mendefinisikan institusi sebagai aturan, karakteristik penegakan aturan, dan norma perilaku yang menstruktur pola manusia yang berulang. Sedangkan, Shurbi S (2020) berpendapat bahwa institusi adalah sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menggaungkan isu-isu spesifik yang dapat bersifat pendidikan, profesional, sosial, dan lain-lain.

Kemudian, Mearsheimer dalam Martin dan Simmons (2012: 328) menyatakan bahwa institusi merupakan serangkaian aturan yang menetapkan cara bagaimana negara harus bekerja sama maupun berkompetisi satu sama lain. North (1990 dalam Joshi dan Carter, 2015:4) berpendapat bahwa nstitusi adalah aturan-aturan formal maupun informal yang mengatur hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Institusi merupakan seperangkat aturan yang persisten dan terhubung yang menentukan peran perilaku, membatasi aktivitas, dan membentuk harapan (Keohane, 1988: 386). Institusi dapat merujuk pada pola umum atau kategorisasi kegiatan atau ke pengaturan buatan manusia tertentu, yang diorganisasikan secara formal atau informal (Keohane, 1988: 383).

Institusi bergerak dalam berbagai bidang dan memiliki banyak bentuk, salah satunya yakni forum. Forum menurut KBBI (t.t.) merupakan tempat untuk

bertukar pikiran secara bebas. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa forum internasional merupakan sebuah wadah bagi negara-negara untuk berdiskusi membahas mengenai suatu isu tertentu. Isu yang dibahas dan didiskusikan bukan hanya isu biasa, namun isu yang menimbulkan kekhawatiran dan permasalahan yang sebaiknya segera untuk diselesaikan. Kemudian, partisipan dalam forum internasional ini merupakan representasi dari negara-negara yang terlibat dalam forum tersebut.

Forum internasional dapat menjadi peluang bagi negara-negara untuk menyuarkan pendapatnya, solusi atau bantuan yang dapat diberikan, hingga kepentingannya. Salah satu contoh dari forum internasional adalah Dewan Arktik. Dalam forum Dewan Arktik, terdapat empat komponen, yakni 1) Anggota Tetap yang terdiri atas negara-negara Arktik; 2) Partisipan tetap yang mewakili *indigenous people* atau penduduk asli Arktik; 3) *Working Groups* yang merupakan pelaksana kegiatan Dewan Arktik; dan 4) Pengamat Tetap yang terdiri atas negara-negara non-Arktik, *non-governmental organizations* (NGOs), dan *intergovernmental and interparliamentary organizations* (Arctic Council, t.t.).

1.4.5. Kerangka Kerja Sama Internasional

Kerjasama internasional mendeskripsikan interaksi untuk meraih tujuan masing-masing saat preferensi para aktor sama maupun berbeda (Paulo, 2014: 3). Keohane dalam Paulo (2014: 3) menyatakan bahwa kerja sama internasional muncul saat para aktor menyesuaikan perilakunya terhadap preferensi pihak lain yang aktual atau yang diantisipasi. Kerja sama internasional memiliki peran penting dan kerja sama menjadi alat terbaik dalam mengatasi masalah kepentingan bersama (Minca, 2015: 238). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tiap negara memiliki kepentingannya masing-masing. Kerja sama dapat dilakukan apabila negara bersedia untuk menyesuaikan perilakunya antara satu sama lain, sehingga muncul kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Dalam kerja sama, negara perlu untuk menyesuaikan kebijakannya dengan tujuan untuk mengurangi konsekuensi negatif atau untuk memfasilitasi tujuan negara lain (Long, 1996: 7). Pembahasan mengenai kerja sama internasional terbagi

menjadi kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral. Bilateral merupakan hubungan antara dua pihak, sedangkan multilateral merupakan hubungan antara tiga pihak atau lebih. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kerja sama bilateral merupakan hubungan atau interaksi yang melibatkan dua kelompok atau negara. Sedangkan, kerja sama multilateral mengarah pada hubungan atau interaksi yang melibatkan tiga atau lebih kelompok atau negara.

1.5. Argumen

Untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan Singapura terkait dengan kawasan Arktik, negara ini memperjuangkannya melalui mekanisme institusi internasional, yaitu Dewan Arktik, dan juga dengan menjalin hubungan kerja sama bilateral dengan negara-negara di kawasan Arktik.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Kepentingan Nasional Singapura

Kepentingan nasional merupakan hal yang ingin diraih oleh suatu negara guna memenuhi kebutuhan nasionalnya. Kepentingan nasional ini menjadi latar belakang bagi negara dalam bertindak. Kemudian, kepentingan nasional juga memiliki empat kepentingan dasar, yakni 1) kepentingan dalam hal pertahanan; 2) kepentingan ekonomi; 3) kepentingan dalam hal tatanan dunia; dan 4) kepentingan dalam hal ideologi (Nuechterlein, 1976: 264). Selain itu, kepentingan nasional menurut Morgenthau (Kiyono, 1969:2) muncul dikarenakan dua faktor, yakni karena adanya permintaan karena adanya kebutuhan, serta kepentingan nasional juga berubah dan ditentukan oleh adanya situasi tertentu.

Dalam penelitian ini, kepentingan nasional suatu negara akan lebih dispesifikan pada kepentingan nasional Singapura di kawasan Arktik yang muncul karena adanya peristiwa *changing Arctic* yang memiliki dampak negatif maupun positif terhadap Singapura. Maka dari itu, hal inilah yang menjadi dasar bagi Singapura untuk terlibat di kawasan Arktik. Watters dan Tonami (2012: 106) menyatakan bahwa sebagian besar kepentingan nasional Singapura di kawasan

Arktik berada pada bidang maritim. Kemudian, Schulze (2017: 5) juga menambahkan bahwa Singapura memiliki kepentingan berupa pengembangan teknologi dan inovasi, hukum internasional, dan perdagangan.

1.6.1.2. Strategi Singapura

Kata 'strategi' berasal dari Yunani Kuno, yakni seni seorang jenderal. Penggunaan kata strategi pada awalnya identik dengan militer atau perang. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pembahasan mengenai strategi tidak lagi selalu identik dengan militer maupun perang (Biddle, 2015: 1). Secara sederhana, strategi mengarah pada bagaimana seseorang mencapai tujuannya (Nickols, 2016: 11). Joint Chief of Staff (2018: 1) menyatakan bahwa strategi adalah tentang bagaimana negara menggunakan kekuatan yang tersedia bagi mereka untuk melakukan kontrol terhadap seseorang, tempat, benda, dan peristiwa untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan nasional mereka. Dalam penelitian ini, strategi dipahami sebagai cara atau langkah Singapura dalam mempertahankan kepentingannya, khususnya dalam menghadapi peristiwa *changing Arctic* yang memberi ancaman dan peluang bagi Singapura. Agar dapat meraih dan mempertahankan kepentingan nasionalnya di kawasan Arktik, Singapura membutuhkan strategi agar dapat meraih kepentingannya.

1.6.1.3. Forum Internasional

Dalam hubungan internasional, tak sedikit negara yang menggunakan institusi sebagai wadah dalam bekerja sama dan untuk meraih kepentingan nasionalnya. Institusi menurut Shurbi S (2020) adalah sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menggaungkan isu-isu spesifik yang dapat bersifat pendidikan, profesional, sosial, dan lain-lain. Sedangkan, Mearsheimer dalam Martin dan Simmons (2012: 328) menyatakan bahwa institusi merupakan serangkaian aturan yang menetapkan cara bagaimana negara harus bekerja sama maupun berkompetisi satu sama lain. Salah satu bentuk dari institusi adalah forum internasional. Menurut KBBI (t.t.), forum merupakan tempat untuk bertukar pikiran secara bebas. Merujuk dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa forum internasional adalah tempat bagi

negara-negara untuk bertukar pikiran.

Dalam skripsi ini, Dewan Arktik menjadi salah satu contoh dari forum internasional di kawasan Arktik dan isu-isu yang kerap kali dibahas dalam Dewan Arktik yakni mengenai isu-isu kawasan Arktik seperti perubahan iklim di Arktik, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan di Kutub Utara, dan lain-lain. Singapura mendaftarkan dirinya sebagai pengamat tetap di Dewan Arktik pada tahun 2011 dan secara sah diterima menjadi pengamat tetap Dewan Arktik pada tahun 2013. Keterlibatan Singapura dalam Dewan Arktik ini tak lain adalah agar Singapura dapat ikut andil dalam forum, menyuarakan pendapatnya, terlibat secara lebih dekat dalam Dewan Arktik dan menjalin hubungan kerja sama dengan negara atau kelompok lainnya dalam Dewan Arktik. Adapun peran pengamat tetap dalam Dewan Arktik, yaitu 1) datang pada pertemuan rapat Dewan Arktik; 2) menjadi pengamat selama rapat berlangsung; 3) negara pengamat dapat mengajukan proyek; dan 4) memberi pernyataan. Meski begitu, pengamat tetap Dewan Arktik tidak memiliki suara untuk melakukan *voting*.

1.6.1.4. Pendekatan Liberal Institusionalisme

Menurut Johnson dan Heiss (2018: 1), liberal institusionalisme beranggapan bahwa institusi domestik maupun internasional memainkan peran utama dalam memfasilitasi kerja sama dan perdamaian antarnegara-bangsa. Kemudian, Keohane (2012: 125) juga berpendapat bahwa institusi dan aturan dapat memfasilitasi kerja sama antarnegara yang saling menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa institusi mampu menjadi wadah bagi negara-negara dalam bekerja sama dan meraih kepentingan nasionalnya. Dalam penelitian ini, pendekatan liberal institusionalisme ini dirasa mampu menjelaskan mengenai keterlibatan Singapura di Dewan Arktik sebagai salah satu contoh dari forum internasional. Hal ini dikarenakan Singapura merasa bahwa Dewan Arktik mampu menjadi wadah kerja sama dengan negara lain. Selain itu, keterlibatannya dalam Dewan Arktik dipandang mampu membawa Singapura dalam meraih kepentingan nasionalnya di kawasan Arktik.

1.6.1.5. Kerja Sama Internasional

Strategi yang dilakukan oleh negara dalam meraih kepentingannya dapat dilakukan dengan cara koersif atau paksaan maupun dengan bekerja sama. Keohane dalam Paulo (2014: 3) menyatakan bahwa kerja sama internasional muncul saat para aktor menyesuaikan perilakunya terhadap preferensi pihak lain yang aktual atau yang diantisipasi. Kerja sama internasional memiliki peran penting dan kerja sama menjadi alat terbaik dalam mengatasi masalah kepentingan bersama (Minca, 2015: 238). Kerja sama dapat dilakukan apabila negara bersedia untuk menyesuaikan perilakunya antara satu sama lain, sehingga muncul kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama. Terdapat dua bentuk kerja sama berdasarkan jumlah pihak yang terlibat, yakni bilateral dan multilateral. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama antara dua negara, sedangkan kerja sama multilateral merupakan kerja sama antara tiga negara atau lebih. Dalam penelitian ini, kerja sama bilateral dapat dilihat dari kerja sama antara Singapura dengan Rusia, serta antara Singapura dengan Norwegia. Sedangkan, kerja sama multilateral dapat dilihat dari kerja sama yang dilakukan oleh Singapura dengan negara-negara yang juga terlibat dalam forum Dewan Arktik.

1.6.2. Tipe Penelitian

Skripsi ini bersifat deskriptif. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memaparkan penjelasan deskriptif yang terkait dengan suatu fenomena dan karakteristiknya (Nassaji, 2015). Dalam hal ini, penulis memaparkan mengenai strategi yang dilakukan oleh Singapura dalam meraih kepentingannya di kawasan Arktik.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Skripsi ini menggunakan data-data primer dan sekunder. Data primer merupakan pengumpulan data langsung yang berasal dari pihak yang bersangkutan, seperti *website* resmi Dewan Arktik, pemerintah Singapura, maupun pemerintah negara-negara anggota dan pengamat tetap Dewan Arktik. Data sekunder diambil dari berbagai sumber, seperti koran digital, jurnal ilmiah, buku, artikel online, dan

lain-lain. Data yang terkumpul dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan alur pikir rancangan argumen yang sebelumnya telah dibangun berdasarkan kerangka pemikiran yang dipakai dalam skripsi ini.

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi pembahasan serta data dari tahun 2011 hingga 2020. Tahun 2011 penulis pilih karena pada tahun tersebut merupakan tahun ketika Singapura mengajukan diri untuk menjadi pengamat dalam Dewan Arktik. Sedangkan pada tahun 2020 penulis pilih untuk mengamati bagaimana perkembangan dari tindakan Singapura terhadap kawasan Arktik itu sendiri. Meski begitu, penulis tetap akan membutuhkan data-data di tahun sebelum 2011 untuk menunjang penelitian ini.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab II mengenai kawasan Arktik dan pandangan Singapura terhadap kawasan tersebut. Bab III berisi mengenai strategi Singapura di kawasan Arktik melalui mekanisme institusi internasional. Pada Bab IV membahas mengenai kerja sama bilateral Singapura dengan negara-negara Arktik. Bab V adalah kesimpulan dari Bab I, II, III, dan IV.